

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi nirlaba atau sekarang disebut dengan organisasi berorientasi nonlaba merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan sosial dengan tujuan tidak mencari keuntungan, biasanya didirikan oleh masyarakat atau dikelola oleh swasta. Contoh organisasi nonlaba seperti gereja, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit dan klinik umum, organisasi politik, bantuan masyarakat, jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, lembaga kajian, museum, dan sebagainya.

Perbedaan karakteristik organisasi nonlaba dengan organisasi bisnis terletak pada cara organisasi nonlaba memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas organisasinya tanpa mengharapkan imbalan yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam organisasi nonlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam organisasi bisnis misalnya penerimaan sumbangan. Selain itu perbedaan lainnya terletak pada bagian laporan keuangannya, yaitu pemisahan dana yang diterima oleh entitas nonlaba. Aset bersih harus disajikan terpisah baik yang terikat maupun yang tidak terikat, maka harus ada pelaporan khusus dan terpisah.

Masjid merupakan salah satu organisasi sektor publik yang tergolong dalam organisasi nonlaba. Dalam menjalankan aktifitasnya masjid mendapatkan sumber dana dari amal, *infaq*, *shadaqqoh* dari umat atau jamaah masjid yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari masjid. Walaupun organisasi ini tidak berorientasi kepada laba, namun mereka tetap berurusan dengan persoalan keuangan karena mereka mempunyai anggaran, membayar tenaga kerja, membayar listrik dan sewa, serta urusan-urusan keuangan lainnya (Andarsari, 2017). Selain sumber dana yang sudah disebutkan, masjid juga mulai membentuk badan usaha dengan tujuan mencari sumber dana alternatif untuk membiayai operasional masjid dengan diadakannya kegiatan-kegiatan yang

bersifat sosial kemasyarakatan seperti, sebagai pusat pendidikan, pusat pengumpulan dan pendistribusian zakat, dan sebagai tempat musyawarah.

Terkait akuntabilitas, bagi organisasi nonlaba bukan lah hal yang mudah, sering kali bendahara organisasi nonlaba merupakan orang yang memiliki keahlian dalam bidang akuntansi bisnis, namun tidak memiliki keterampilan khusus dalam akuntansi sosial. Oleh sebab itu organisasi nonlaba disarankan dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku.

Laporan keuangan merupakan suatu alat yang digunakan untuk memberikan informasi yang sangat penting bagi sebuah organisasi. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan diperlukan bagi penggunanya yaitu pihak internal dan pihak eksternal dari organisasi seperti donatur, kreditur, serta pihak lainnya. Pengguna laporan keuangan organisasi nonlaba memiliki kepentingan bersama yang tidak berbeda dengan organisasi bisnis, yaitu menilai jasa yang diberikan oleh organisasi nonlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa serta cara manajer melaksanakan tanggung jawab dan aspek kinerjanya.

Untuk entitas nonlaba, standar laporan keuangannya diatur dalam PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. Peraturan ini disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tanggal 8 April 2011. Akan tetapi, pada September 2018 lalu, DSAK mengganti PSAK 45 dengan ISAK 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2020. Perubahan yang terjadi kemudian tidak hanya sebatas pada perubahan istilah non-profit dari nirlaba menjadi nonlaba, tetapi juga terhadap perubahan pada ruang lingkup objek ISAK 35 yaitu entitas berorientasi nonlaba terlepas apapun bentuk hukumnya.

Laporan keuangan yang disusun berdasarkan ISAK 35 merupakan salah satu cara manajemen melaksanakan tanggung jawab atas penggunaan sumber daya. Laporan keuangan organisasi nonlaba dibuat untuk menyediakan informasi yang relevan guna memenuhi kepentingan para donatur, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nonlaba. Jika suatu organisasi nonlaba tidak menyediakan laporan keuangan yang sesuai

dengan standar, maka akan mengurangi kepercayaan dari pemberi sumber daya dalam memberikan sumber daya kepada organisasi nonlaba. Selain itu, organisasi nonlaba akan mengalami kesulitan dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan yang berisiko organisasi nonlaba tidak mampu lagi melakukan kegiatannya.

Untuk menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan standar perlu dilakukan proses penyusunan laporan keuangan yang benar. Pelaporan yang sesuai dengan ISAK No. 35 yaitu:

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) pada akhir periode laporan.
2. Laporan Penghasilan Komprehensif untuk satu periode.
3. Laporan Perubahan Aset Neto untuk satu periode.
4. Laporan Arus Kas untuk satu periode.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Kemampuan organisasi nonlaba untuk memberikan informasi melalui laporan posisi keuangan yang menyediakan informasi mengenai aset, liabilitas, aset neto, dan informasi mengenai hubungan di antara elemen-elemen tersebut. Seperti yang dilakukan pada penelitian sebelumnya oleh (Dwi Krismontiyah et al., 2021) di Masjid Baitul Makmur Situbondo mereka menyimpulkan bahwa laporan keuangan masjid belum sesuai dengan ISAK 35. Masjid hanya membuat buku kas infaq takmir Masjid Baitul Makmur dan laporan keuangan bulanan yang mencatat transaksi pemasukan dan pengeluaran saja.

Penelitian lain juga dilakukan oleh (Diviana et al., 2020) pada Masjid Baitul Haadi. Hasil dari penelitian mereka menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 dapat menyajikan perubahan aset neto dan menyajikan naik turunnya aset neto selama periode tertentu, sehingga bisa dijadikan sebagai penilaian kinerja Masjid Baitul Haadi.

Masjid Maulidiyah Pontianak didirikan pada tahun 2007 diatas lahan milik keluarga Maulidiyah. Lahan dibagian depan dipergunakan sebagai bangunan masjid, sedangkan lahan dibelakang masjid digunakan sebagai pemakaman keluarga. Awal pembangunan masjid Maulidiyah hanya terdiri dari satu bangunan, seiring dengan berjalannya waktu masjid mengalami

perkembangan pembangunan. Sekarang Masjid Maulidiyah terdiri dari dua bangunan, fungsi bangunan pertama digunakan untuk kegiatan ibadah dan keagamaan, sedangkan bangunan kedua digunakan untuk kegiatan pendidikan seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Pendidikan Al-qur'an (TPA).

Letak Masjid Maulidiyah yang cukup strategis di tepi jalan utama Kota Pontianak, membuat masjid ini selalu ramai oleh jamaah baik pada setiap waktu shalat *fardhu* maupun pada kegiatan pendidikan non formal. Masjid ini merupakan masjid yang aktif mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti kegiatan ibadah shalat fardhu berjamaah, shalat jum'at, shalat tarawih, shalat ied dan perayaan hari besar islam lainnya. Adapun kegiatan lainnya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman agama bagi jamaah masjid seperti kajian fiqih yang diadakan setiap hari Selasa, kajian tazkiyah an-nafs pada hari Rabu, kajian tahsin pada hari Kamis, dan kajian tauhid di hari Jum'at.

Masjid Maulidiyah Pontianak memiliki daya tampung ± 800 jamaah. Dengan banyaknya jumlah jamaah pendapatan masjid perminggunya bisa mencapai \pm Rp 5.890.000 didapat dari infaq jamaah dan masyarakat. Dana yang didapat akan digunakan untuk kegiatan masjid maka seluruh dana yang dikeluarkan harus dipertanggungjawabkan, terutama laporan keuangan masjid sebagai entitas berorientasi nonlaba. Sehingga laporan keuangan masjid sebagai entitas berorientasi nonlaba harus membuat laporan keuangan dengan pelaporan yang baik dan sesuai dengan standar pelaporan keuangan entitas berorientasi nonlaba sesuai dengan ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba. Namun, Masjid Maulidiyah masih menyajikan laporan keuangan secara sederhana saja, hanya mengurangkan uang masuk dengan uang keluar. Tidak ada laporan lain yang dibuat oleh Masjid ini, padahal Masjid ini tergolong Masjid besar di Kota Pontianak.

Dalam laporan keuangan yang dibuat belum terlihat akuntabilitas dan transparansi terhadap laporan keuangan semestinya. Pencatatan terhadap inventaris aset belum tergambar dengan baik. Masjid belum pernah membuat daftar aset tetap dan belum pernah menghitung nilai aset tetap beserta dengan

penyusunannya, sehingga posisi keuangan yang tercermin dalam catatan keuangan masjid hanya berupa kas saja.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan yang ada yaitu Masjid Maulidiyah Pontianak belum menerapkan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi berupa ISAK 35. Sehingga topik dalam penelitian ini adalah **“Penerapan ISAK No. 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Pada Masjid Maulidiyah Pontianak”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana penerapan ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba pada Masjid Maulidiyah Pontianak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Penerapan ISAK 35 tentang penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba pada Masjid Maulidiyah Pontianak.

1.4 Kontribusi

- 1) Bagi Masjid

Adanya penelitian ini dapat menjadi salah satu tahapan yang dilakukan pengurus masjid Maulidiyah dalam meningkatkan akuntabilitas ilmu akuntansi.

- 2) Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi

Adanya penelitian ini dapat menjadi salah satu tolak ukur relevansi mengenai standar yang dikeluarkan dengan keadaan di lapangan, sehingga praktisi dan akademisi di bidang akuntansi juga dapat menjadi motor penggerak untuk tidak hanya sekedar mensosialisasikan tapi juga membina entitas nonlaba untuk membuat pelaporan kemajuan disiplin ilmu akuntansi khususnya pada akuntansi keuangan lanjutan dan teori akuntansi.